**KEBERADAAN SAKSI DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

**TAHUN 2014 DI KABUPATEN BONE**

**AHMAD**

**Ahmadyogi833@yahoo.com**



**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2016**

ABSTRAK

AHMAD 2016. “*Keberadaan Saksi Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bone*” Tesis. Dibimbing oleh H. Heri Tahir dan Manan Sailan.

Tujuan Penelitian untuk (1) mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peranan saksi pada pemilu legislatif tahun 2014 di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Bone, (2) menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran saksi pada pemilu legislatif tahun 2014 di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan hasil temuan penelitian secara naratif.Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen Wawancara dengan informan agar diperoleh data yang lebih mendalam mengenai keberadaan saksi. Analisis data menggunakan pendekatan deduktif yakni berangkat dari kerangka teori yang umum untuk selanjutnya dikorelasikan dengan kenyataan-kenyataan obyektif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan peranan saksi pada pemilu legislatif tahun 2014 di Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone diantaranya : (a) Pemberian akomodasi berupa transportasi terhadap saksi selama menjalankan tugas, fungsi, dan tanggungjawab, (b) Partai politik melengkapi dan memperbanyak jumlah personil saksi yang bertugas di lapangan mengingat ketersediaan saksi merupakan hak dan bukan kewajiban partai politik dalam pemilihan umum, (c) Partai politik memberikan pelatihan atau pembimbingan pada saksi-saksi sebelum menugaskan dan menjalankan tugas mereka masing-masing,

 Faktor-faktor yang mempengaruhi peran saksi pada pemilu legislatef tahun 2014 di Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone diantaranya : (a) Kurangnya pemahaman saksi terhadap aturan yang berkaitan dengan pemilihan umum serta keberadaaan mereka sebagai saksi sehingga dapat menurunkan rasa tanggungjawab dan keseriusan mereka dalam menjalankan tugasnya masing-masing, (b) Pemberian intensif atau honor yang kurang memadai menyebabkan menurunnya semangat dan konsentrasi mereka selama manjalankan tugas, dan fungsi mereka di lapangan , (c) Partai politik tidak memberikan pelatihan dan pendampingan atau perhatian yang cukup selama saksi berada di lapangan, (d) Saksi-saksi yang terpilih dan ditugaskan tidak memiliki sumberdaya yang memadai.

ABSTRACT

AHMAD. 2016. *The Presence of Witnesses in Legislative Election in 2014 in Bone District* (supervised by Heri Tahir and Manan Sailan).

 The study aims at (1) discovering the efforts to optimize the roles of witnesses in legislative election in 2014 in electoral district 1 in Bone district, (2) explaining and analyzing factors which influence the roles of witnesses in legislative election in 2014 in electoral district 1 in Bone district. The type of the study is descriptive research which describes the result in narrative way. Data is collected using interview research which describes the result in narrative way. Data is collected using interview instrument taken from the informants to obtain in-depth data concerning the presence of the witnesses. Data is analyzed deductively which stars from the general theory then correlated to objective facts.

 The results of the study reveal that the efforts conducted to optimize the roles of witnesses in legislative election in 2014 in electoral district 1 in Tanete Riattang subdistrict of Bone district among others are: (a) providing accommodation in a from of transportation towards witnesses when conducted the task, function, and responsibility, (b) the political party completes and adds witnesses who are on duties at the field considering the availability of witnesses is a right, not an obligation of political party in general election, (c) the political party provides training or counseling to the witnesses before assigning and conducting their own tasks.

 The factors which influence the roles of witnesses in legislative election in 2014 in electoral district 1 in bone district among other are (a).luck of understanding of witnesses towards regulation related to general election and their presences as own tasks,(b).providing incentives and honors which are still lacking causing the field.(c).the political party did not give training and accompaniment or adequate attention when the witnesses are at the field,and.(d).the chosen witnesses who are assigned have inadequate source

Key words witnesses and legislative election

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar negara yang mewujudkan cita-cita bersama rakyat Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, di mana dalam kehidupan bernegara diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*) dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum (*nomocracy*. Keduanya diwujudkan dalam pekembagaan sistem demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitusional democracy*) dan prinsip negara hukum yang demokratis (*democratishe rechstaat*).

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengatur tentang asas pemilu yang dituangkan dalam Pasal 22E Ayat (1) bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Saksi di TPS, PPK dan KPU Kabupaten idealnya berperan sesuai amanah undang-undang yakni menyaksikan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara serta ikut aktif mengingatkan dan mencegah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ketika dalam proses pemungutan dan penghitungan suara terdapat atau terjadi hal-hal yang bertentangan dengan UU RI nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan KPU nomor 03 tahun 2009 serta perubahan peraturan KPU nomor 13 tahun 2009 tentang pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pentingnya hal tersebut untuk memberikan legitimasi terhadap hasil pemilu anggota DPRD, daerah pemilihan (Daerah pemilihan). Legitimasi dimaksudkan agar memungkinkan tidak terjadi kecurangan baik dilakukan oleh partai politik, penyelenggara, pemerintah dan masyarakat lainnya.

Dalam kasus pemilu di Daerah pemilihan 1 Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, masih ditemukan adanya saksi partai potitik pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan masih mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tingkat TPS terutama dalam hal dugaan manipulasi suara dan pelanggaran lainnya, padahal tahapan tersebut sudah terlewatkan dan masalah saksi pada TPS tersebut tidak mengisi format keberatan yang disiapkan dan anehnya semua saksi di TPS telah menandatangani berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara, ini mengindikasikan bahwa ada peran-peran saksi yang tidak maksimal. Secara umum dibutuhkan kesadaran hukum keberadaan saksi partai politik dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, selanjutnya dipertajam pokok permasalahan dan dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

* 1. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peranan saksi pada pemilu legislatif tahun 2014 di Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
	2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peran saksi pada pemilu legislatif tahun 2014 di Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

 Tujuan penelitian (1).Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peranan saksi pada pemilu legislatif tahun 2014 di Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.(2).Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran saksi pada pemilu legislatif tahun 2014 di Daerah Pemilihan 1Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

Legislatif adalah badan debileratif pemerintah yang kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama yaitu: parlemen, kongres dan asembli nasional. Dalam sistem partemen, legislatif adalah badan tertinggi dengan menunjuk eksekutif. Dalam sistem presidential, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dan eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadang-kadang menulis perjanjian dan memutuskan perang (Muchsan, 1992).

Didalam Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2012 pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Saksi menurut undang-undang secara umum telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah digratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 35 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Ketentuan tersebut secara spesifik kembali diatur dalam RUU Perlindungan Saksi (Versi Koalisi LSM) dalam Pasal 1 angka 1, saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dari atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang Ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.

**METODE PENELITIAN**

Rancangan penelitian merupakan keseluruhan prosedur perencanaan dan pelaksanaan penelitianyang meliputi prosedur pengumpulan data dan pengelolaan data yang telah ditentukan.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu menggambarkan hasil temuan penelitian secara naratif. Fakta-fakta yang ditemukan dilapangan sehubungan dengan keberadaan saksi di TPS, dan PPK di daerah pemilihan 1 Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dihubungkan dengan teori hukum berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,dokumentasi melalui kajian literatur, dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Teknik Analisis DataSetelah seluruh data telah berhasil dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha menjawab masalah penelitian.Data kuantitatif disajikan dalam bentuk table dan ditafsirkan secara kualitatif.Sedangkan pendekatan yang dipakai sebagai bagian dari usaha analisis adalah pendekatan deduktif yakni berangkat dari kerangka teori yang umum untuk selanjutnya dikorelasikan dengan kenyataan-kenyataan obyektif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**
2. **Kondisi Geografis dan Penduduk**

Kabupaten Bone berjarak kurang lebih174 kilometer dari pusat kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, terletak pada posisi 4o13’ - 5o6’ Lintang Selatan dan 119o42’ - 120o30’ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km2dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Wajo, Soppeng

- Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai, Gowa

- Sebelah Barat : Kabupaten Maros, Pangkep, Barru

- Sebelah Timur : Teluk Bone

Mengingat Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten tertua dan terbesar wilayahnya di Sulawesi Selatan, serta dengan jumlah penduduknya yang cukup besar pula maka dengan perkembangan pembangungan dewasa ini sangat memungkinkan terciptanya masyarakat heterogen baik pada perubahan-perubahan sosial hingga pada terciptanya karakter masyarakat yang mengerti dan memahami perkembangan politik.

**2. Kondisi Pemilu Legislatif Tahun 2014 Dapil 1 Kecamatan Tanete Riattang**

Daerah Pemilihan 1 (Dapil 1) Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone pada pemilu legislatif tahun 2014 merupakan daerah yang sangat penting, karena pada Dapil 1 tersebut terbentuk dari beberapa Kecamatan, diantaranya adalah kecamatan Ibukota Kabupaten yang konsentrasi masyarakat cukup banyak karena berada di perkotaan.

Bedasarkan pencacahan tahun 2010, jumlah penduduk yang memiliki hak suara (wajib pilih) pada Dapil 1 Kabupaten Bone KecamatanTtanete Riattang sebanyak 35.763 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 15.705 Jiwa dan perempuan sebanyak 20.085 jiwa. Data mengenai sebaran jumlah penduduk wajib pilih pada Dapil 1 tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kelurahan/Desa | Penduduk Wajib Pilih Dapil 1 Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone |
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Watampone | 1,485 | 3,571 | 5,056 |
| 2 | Pappolo | 671 | 983 | 1,654 |
| 3 | Wallanae | 982 | 1,232 | 2,214 |
| 4 | Ta’ | 2,237 | 2,789 | 5,026 |
| 5 | Manurungge | 2,885 | 3,626 | 6,511 |
| 6 | Masumpu | 2,934 | 2,462 | 5,396 |
| 7 | Biru | 3,135 | 3,718 | 6,853 |
| 8 | Bukaka | 1,376 | 1,677 | 3,053 |
| 9 |  |  |  |  |
| J u m l a h | 15,705 | 20,058 | 35,763 |

Sumber : Sekretariat KPUD Bone

Efektifitas dan efisiensinya tugas-tugas penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone membagi daerah pemilihan sesuai pasal 27 ayat (1) dikemukakan bahwa daerah DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Sementara jumlah kursi setiap daerah pemilihan diatur dalam ayat (2); jumlah kursi setiap daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota ditetapkan sama dengan pemilu sebelumnya.

Daerah pemilihan Kabupaten Bone sebanyak 4 (empat) daerah pemilihan (Dapil). Dapil 1 terdiri dari beberapa kecamatan diantaranya : Kecamatan Palakka, Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, dan Tanete Riattang Timur dengan alokasi 10 (sepuluh) kursi.

Untuk melakukan proses pemilihan umum dan penghitungan suara, maka KPU Kabupaten Bone membentuk penyelenggara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, di tingkat desa/kelurahan dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan di tingkat TPS dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Untuk mengawasi kerja PPK, PPS, dan KPPS maka terdapat lembaga *Ad Hoc* yakni Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

Pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan dengan pertimbangan jumlah pemilih setiap TPS sesuai dengan Pasal 150 ayat (1); jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone membagi jumlah TPS berdasarkan kondisi wilayah dalam desa/kelurahan. Aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan TPA adalah akses pemilih terhadap letak tiap-tiap TPS yang akan dibangun sehingga pemilih akan lebih mudah hadir menggunakan hak pilihnya. Jumlah TPS dalam wilayah Dapil 1 Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yang terdidri dari 8 ( delapan ) Kelurahan / Desa adalah sebanyak 91 ( Sembilan puluh satu) TPS.

Proses pengajuan bakal calon anggota legislatif, partai politik mengajukan berdasarkan daerah pemilihan. Setiap daerah pemilihan, partai politik dapat mengajukan calon maksimal 120 % dari jumlah kursi seperti diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, daftar bakal calon sebagaimana dimkasud dalam pasal 52 memuat paling banyak 120 % dari jumlah kursi pada daerah pemilihan. Semntara pasal 53 diatur bahwa daftar calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memuat palin sedikit 30 % perwakilan perempuan. Ditambahkan dalam pasal 55 ayat (2) dijelaskan bahwa di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan.Daftar partai politik dan calon anggota legislatif kabupaten bone pada pemilu 2014 daerah pemilihan (Dapil) 1 Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

**Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Peranan Saksi pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone**

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peranan saksi adalah segala bentuk yang berkaitan tindakan, saran, untuk menjalankan tugas, tanggungjawab, dan fungsi terkait dengan pemilihan umum legislatif tahun 2014. Seperti Pelatihan atau kursus untuk menjadi saksi di internal partai Pelatihan atau kursus pada saksi yang dimaksud adalah suatu tindakan atau perlakuan terhadap saksi untuk meningkatkan pengetahuan mereka terkait pemilihan umum dan tugas atau fungsi mereka untuk mewakili partai sebagai bentuk pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan pemilihan umum.

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Saksi Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone**

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran saksi pada pemilu legislatif adalah segala bentuk yang berkaitan dengan pengetahuan, dukungan, motivasi, penghambat, dan keberadaan saksi pada pemilihan umum legislatif 2014, berdasarkan hasil wawancara selama penelitian :

1) Hukum yang berkaitan dengan keberadaan saksi di pemilihan umum

Keberadaan saksi diatur dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu 2014 dijelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi partai politik peserta pemilu. Selanjutnya dikemukakan dalam pasal 154 ayat (2) bahwa saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, pemantau pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS.

2) Urgensi keberadaan sebagai saksi dalam pemilihan

Kesadaran saksi akan tugas, fungsi, dan tanggungjawab mereka merupakan kunci dalam proses pemilu yang juga merupakan salah satu tumpuan harapan partai politik, karena terkait keberhasilan perolehan suara, tindakan kecurangan atau pelanggaran, serta kerugian yang dapat ditimbulkan akibat kurangnya fokus perhatian saksi dari partai politik.

Upaya yang perlu dilakukan partai politik dalam menugaskan saksi Peningkatan kapasitas atau sumberdaya sangat berpengaruh terhadap peran saksi pada pelaksanaan pemilu, hal tersebut tidak terlepas dari tanggungjawab partai politik sebagai pemberi mandat untuk menjalankan tugas dilapangan.

1. **Upaya-Upaya Yang Dapat dilakukan Untuk Mengoptimalkan Peranan Saksi dalam Pemilihan Umum**

Pengoptimalan peranan saksi sangat penting dilakukan oleh pihak partai politik yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu pelatihan atau kursus pada saksi. Tujuannya adalah agar saksi paham dan mengerti tugus mereka masing-masing yang sesuai tata cara yang dimaksudkan oleh produk hukum terkait pemilihan umum dan peraturan dari KPU.

1. **Faktor faktor yang memepengaruhi Peran Saksi Pada Pemilu Legislatif**
2. Pembelajaran Tentang Hukum Pada Saksi Pemilihan Umum

Unsur yang penting dalam meningkatkan pelaksanaan pemilu adalah memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi peran saksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik secara internal maupun eksternal sehingga dapat meningkat kinerja mereka.

1. Kesadaran saksi akan tugas, fungsi, dan tangungjawab

Merupakan kunci dalam proses pemilu yang juga menjadi salah satu tumpuan harapan partai politik, karena terkait keberhasilan perolehan suara, tindakan kecurangan atau pelanggaran, serta kerugian yang dapat ditimbulkan akibat kurangnya fokus perhatian saksi dari partai politik. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa saksi cukup paham dengan tugas, fungsi, dan tangung jawab mereka masing masing meskipun dengan penjelasaan yang sederhana, Saksi menilai ukuran pentingnya keberadaan mereka lebih dibebankan kepada partai politik karena penilaian dan kebutuhan akan hasil yang maksimal lebih berada pada kepentingan partai politik.

1. Kapasitas, kepedulian dan perhatian saksi

Tugas yang diberikan partai politik kapasitas saksi turut menjadi ukuran keberhasilan atas perolehan suara partai politik pada pemilihan umum. Selain diharapkan dapat hadir pada tiap tahapan pemilu, saksi juga harus memiliki rasa tanggung jawab sehingga mereka dapat serius,focus,berkonsentrasi,dan sabar dalam mengemban tugas yang telah dibebankan

1. Penghambat untuk mengikuti semua proses baik itu pemilihan, penghitungan.

Meskipun secara internal saksi memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi teriiaiiap togas yang niercka jalankan dais mengharapkan basil yang maksiinal dari kinerja mereka masing-masing, tetapi hal itu tidak menuntup kemungkinan adanya penghambat secara eksternal yang dihadapi oleh saksi untuk melaksanakan tugas­tugas mereka.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penyajian data hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dikemukakan kesimpulan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peranan saksi pada pemilu legislatif tahun 2014 di Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone diantaranya : (1) Pemberian akomodasi terhadap saksi selama menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab. (2) Partai politik memberikan palatihan atau pembimbingan terlebih dahulu pada saksi-saksi sebelum menugaskan dan menjalankan tugas mereka masing-masing, (3) Pelaksanaan pemilihan umum lebih efektif dan efisien agar dapat dilakukan lebih optimal oleh semua pihak yang terkait di dalamnya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran saksi pada pemilu legislative tahun 2014 di Daerah Pemilihan 1 Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone diantaranya : (1) Pemahaman saksi terhadap aturan atau hukum uang berkaitan dengan pemilihan umum (2) Saksi tidak mengerti dan memahami kapasitas kepedulian dan perhatian dalam pemilihan umum, (3) Kesadaran masyarakat tugas dan pungsi menjadi saksi dalam pemilihan umum.Sesuai dengan kesimpulan penelitian ini, maka diajukan saran sebagai berikut:
3. Mengingat peran saksi sebagai wakil partai politik pada setiap tingkatan tahapan mulai pelaksanaan pemungutan (pemilihan), penghitungan, dan rekapitulasi suara di TPS, PPK, hingga di KPU maka saksi harus dibekali secara maksimal dengan maksud agar mereka dapat memahami dan mengerti tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing.
4. Untuk mendukung secara efektif dan efisien tugas saksi maka diperlukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 untuk mempertegas peran saksi yang bukan hanya sebagai hak partai poilitik tetapi merupakan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
5. Efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemilu, dimana penghitungan dan rekapitulasi suara berlangsung dengan menggunakan waktu yang cukup lama disebabkan mekanisme dan partai politik peserta pemilu banyak, maka dibutuhkan sistem yang lebih sederhana serta revisi peraturan yang membatasi partai politik peserta pemilu.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Rozali, 2007. *Pelaksanaan Otonorni Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta Rajawali Press.

Ali, Achmad.2002. *Menguat Tabir Hukum (Suatu Kajian Sosiologis)*, Jakarta.Gunung Agung.

Ali, Lukman, dkk., 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.

Bosrah, Abu Daud. 1994. *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. RinekaCipta.

Djazuli.2008. *Analisis Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004 di Kabupaten Majene (Tesis)*, Makassar; Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

Fahmal, A Mum, 2008. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Yokyakarta. Kreasi Total Media.

Gunawan, Markus. 2008. *Buku Pintar Calon Anggota Dan Anggota Legislatif*, Jakarta: Visi media

Heryani, Wiwie, 2008. *Hakikat dan Kedudukan Dissenting Opinion Bagi Kemandirian Hakim di Indonesia (Kajian Hukum Empiris).*Pascasarjana Unhas: Disertasi

Koirudin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Malang. Averroes Press.

Latief, Abdul, dkk. 2009. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yokyakarta. Total Media

Lotulung, Paulus Effendi. 1993. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra AdityaBakti.

Mahfud MD., 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.

\_\_\_\_\_\_\_2003.*Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesi*

Manan, Bagir. 2001. *Menyonsong Fajar Otonomi Daerah*, Yokyakarta. PusatStudi Fakultas HukumUll.

Muchsan, 1992.*Sistim Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*.Yogyakarta. Liberty

Romli, Lihi, 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*.Yokyakarta.Pustaka Pelajar.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2002. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good governance dan perwujudan Masyarakat Madani*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Wahidin, Samsul, 2007. *Dimensi Kekuasaan Negara*, Yogyakarta: PustakaPelajar.

\_\_\_\_\_\_\_, 2007.*Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Jakarta. PustakaPelajar.

**Artikel dan Jumal**

Endaryanta, Erwin. *“Debat UUD 1945 Amandemen UUD, system Pemiludan Bangunan Rezim Politik.*Yokyakarta, Januari 2010

Linawati, Ester. “*Psikologi Dalam Ranah Hukum*” diakses melalui http://esterlianawati.wordpress.com/2008/06/24/psikoloqi-dalam-ranah-hukum/ pada tanggal 2 Januari 2014.

Patriadi, Pandu. 2004. *“ManfaatKonsep Good Governance Bagilnstitusi Pemerintahdan BUMN dalam Kebijakan Privatisasi BUMN” dalam jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 8 No. 32004.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-UndangNomor 2 Tahun 2008 TentangPartaiPolitik

Undang-UndangNomor 8 Tahun 2012TentangPemilihanUmumTahun 2012

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam